

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN MASJID BERDASARKAN ISAK NOMOR 35
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI
BERORIENTASI NONLABA PADA MASJID RAYA
RAUDHATUL ABIDIN BANGGAE
KABUPATEN MAJENE**

*ACCOUNTABILITY AND TRASPARENCY IN MOSQUE FINANCIAL
MANAGEMENT BASED ON ISAK NUMBER 35 CONCERNING
FINANCIAL REPORTING NON-PROFIT ORIENTED
ORGANIZATIONS AT THE RAYA RAUDHATUL
ABIDIN BANGGAE MOSQUE MAJENE REGENCY*



NURFADILAH

C02 18 364

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

NURFADILAH, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK Nomor 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae Kabupaten Majene, dibimbing oleh Jumardi, SE.,M.Si dan Taufik Hidayat B. Tahawa, SE.,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid dan melihat pencatatan laporan keuangan untuk organisasi nonlaba menurut ISAK 35 pada masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae Kabupaten Majene. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yaitu Ketua Masjid, Bendahara Masjid, Wakil Bendahara Masjid, Imam Masjid, dan Jamaah. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengurus Masjid telah mengelola keuangan dengan terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan dicatat dengan baik yang sudah dikomputerisasi. Terkait ISAK 35, pengurus masjid belum melakukan pencatatan berdasarkan ISAK 35 dikarenakan standar tersebut belum pernah terdengar ataupun diperkenalkan pada pengurus dan aturan akan laporan keuangannya merupakan tradisi turun temurun.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Masjid, ISAK 35

ABSTRACT

NURFADILAH, *Accountability and Transparency in Mosque Financial Management Based on ISAK Number 35 Concerning Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities at Raudhatul Abidin Banggae Grand Mosque, Majene Regency, supervised by Jumardi, SE.,M.Sc and Taufik Hidayat B. Tahawa, SE.,M.Ak*

This study aims to find out how accountability and transparency are in financial management at mosques and look at recording financial reports for non-profit organizations according to ISAK 35 at the Raya Raudhatul Abidin Banggae mosque, Majene Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. The research location was carried out at the Great Mosque of Raudhatul Abidin Banggae, Majene Regency. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. Respondents in this study were the Chairperson of the Mosque, the Treasurer of the Mosque, the Deputy Treasurer of the Mosque, the Imam of the Mosque, and the Congregation. The research results obtained indicate that the mosque management has managed finances openly as a form of mosque financial responsibility by recording cash receipts and disbursements. Financial management is properly recorded which has been computerized. Regarding ISAK 35, mosque administrators have not kept records based on ISAK 35 because this standard has never been heard of or introduced to administrators and the rules for financial reporting are a hereditary tradition.

Keywords : *Accountability, Transparency, Financial manajemen at mosques, ISAK 35*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan sistem perekonomian yang tujuan utamanya berorientasi pada kepentingan umum melalui pelayanan publik bukan digunakan untuk memperoleh keuntungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Organisasi nonlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga karena aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat (Welim dan sakti, 2016). Organisasi sektor publik dapat dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman organisasi sektor publik sudah banyak ditemui di kalangan masyarakat. Sehingga, sebagai organisasi sektor publik perhatian dan tuntutan serta upaya akan transparansi dan akuntabilitas mengalami banyak peningkatan. Keduanya merupakan konsep yang dibutuhkan dalam proses manajemen yang dibangun berdasarkan sistem akuntansi.

Kemampuan sektor publik untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan laporan aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya untuk menghindari adanya kecurangan (Kusnadi, 2018). Pertanggungjawaban yang dilakukan suatu organisasi sektor

publik merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan selama satu periode.

Peran akuntansi sebagai tools dalam lingkup keagamaan untuk entitas-entitas peribadatan sebenarnya hadir dengan bentuk kombinasi antara akuntansi dan agama (Spiritual). Organisasi keagamaan adalah organisasi yang mencakup kegiatan pada bidang agama dimana organisasi tersebut bergerak untuk mendukung agama tersebut. Didalam organisasi keagamaan biasanya ada beberapa pihak yang mengelola seperti pemeliharaan tempat ibadah. Organisasi keagamaan tergolong organisasi nirlaba dimana didalamnya para pengurus tidak menerima upah atas apa yang dikerjakan atau bisa disebut dengan kerja suka rela.

Masjid merupakan organisasi keagamaan yang tergolong dalam organisasi nonlabat, dimana para pengurus masjid diberi amanah dalam mengatur dan melaporkan penggunaan dana yang diperoleh dari sumbangan. Masjid digunakan sebagai tempat untuk beribadah sekaligus berfungsi sebagai tempat kegiatan umat yang bersifat sosial kemasyarakatan, karena sejatinya mesjid yang makmur adalah mesjid yang tidak hanya digunakan untuk melaksanakan shalat saja melainkan digunakan sebagai tempat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat (Nurjannah 2018), yang pendanaan kegiatan operasionalnya maupun pendanaan lainnya yang berkaitan dengan mesjid diperoleh dari donasi, kotak amal, zakat, infaq sedekah atau sumbangan lainnya yang berasal dari publik. Dana dari masyarakat digunakan dan dikelola dengan baik dan benar, perlu dilakukan pencatatan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat. Namun, faktanya banyak dari masyarakat yang tidak

memedulikan akan hal tersebut, padahal pelaporan keuangan organisasi nirlaba di masjid juga sangat penting dan memiliki pengaruh yang cukup besar.

Masjid Raya Raodhatul Abidin Saleppa merupakan yang terletak di tengah Pertokoan Majene. Masjid yang mempunyai nilai keagungan sejarah yang dibangun oleh Persatuan Umat Muslim dibawah komando Maraqqdia sekitar tahun 1907 (Fokusmetrosulbar, 2016). Meskipun mesjid ini bukan mesjid Provinsi tetapi sangat menarik perhatian karena memiliki history yang panjang serta kepengurusan didalamnya terdiri dari semua lini masyarakat, mulai dari Eksekutif, Legislatif, ASN, Pengusaha, Ulama dan Tokoh Masyarakat. Karena lokasinya yang strategis berada di Pusat Petokoan, mesjid ini dijadikan tempat singgah bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh. Sehingga tak jarang mesjid ini kita jumpai ramai. Sumber pendanaan Masjid Raya Raudhatul Abidin Saleppa berasal dari kotak amal, sedekah yang diterima setiap minggu dari donatur tetap, hasil penyewaan penginapan yang dimiliki oleh Masjid, serta sumber lainnya.

Masjid Raya Raudhatul Abidin terkait pemasukan berasal dari dana pribadi dan dan bantuan pemerintah dalam pengelolaan keuangan Masjid Raya Rudhatl Abidin terdapat perbedaan dengan masjid-masjid lain dimana Masjid ini tidak hanya mengumumkan laporan keuangan pada hari jum'a tetapi laporan setelah disampaikan tersebut diarsipkan dan diamankan. Tidak hanya itu, masjid ini dilengkapi dengan CCTV sebagai keamanan Masjid. Untuk pemasukannya berasal dari sumbangan per'orangan, sumbangan jum'at, sedekah, dan hasil sewa penginapan yang dimiliki Masjid Raya Raudhatul Abidin.

Pada 23 Desember 1997 IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 4. Dan pada 1 Januari 2000, Ikatan Akuntan Indonesia Memberlakukan efektif, standar mengenai organisasi nonlaba yakni PSAK 45 yang dimaksudkan untuk membantu organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan dalam organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berkaitan dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45, IAI menerbitkan hal yaitu Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK 13) berisikan pencabutan PSAK 45 yang berlaku efektif mulai dari 1 Januari 2020. Dengan demikian PSAK 45, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan ISAK 35 yang diberlakukan efektif sejak tanggal Pencabutan PSAK 45. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas nirlaba.

Terkait posisi keuangan suatu entitas dalam satu periode akuntansi dengan maksud untuk melihat performa laporan keuangan organisasi terkait ISAK 35 membahas terkait penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (ISAK IAI) yang merupakan turunan dari PSAK 01 paragraph 35 harus memenuhi lima komponen yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan penghasilan komprehensif, Laporan perubahan asset neto, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya Standar atau pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi Nonlaba diharapkan para pengurus mesjid terutama bendahara dapat mengelola keuangan mesjid sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat

sebagai pemberi dana, serta dapat menyusun laporan keuangan yang lebih muda dipahami, memiliki daya banding, serta relevan.

ISAK Nomor 35 dibentuk untuk memenuhi standar laporan keuangan masjid akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena banyaknya sebab-sebab yang membuat pedoman ini tidak terlaksana, seperti bentuk pertanggungjawaban dilaporkan setiap seminggu sekali pada saat ibadah sholat jum'at. Mereka hanya mengetahui bahwa mesjid hanya tempat ibadah saja cukup melaporkan laporan keuangan pada saat sholat jum'at. Laporan yang dibuat dalam bentuk informasi saldo kas minggu sebelumnya, jumlah penerimaan jum'at sebelumnya dan penggunaan kas pada jum'at sebelumnya. berbeda dengan perusahaan ketika Standar akuntansi berubah perusahaan harus menyesuaikan perubahan tersebut.

Dengan demikian, fungsi akuntansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan masjid yang tujuannya menyajikan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk akuntabilitas karena dana yang diperoleh oleh mesjid merupakan dana yang bersumber dari masyarakat. Dengan adanya laporan keuangan juga mesjid menjadi transparan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan

Berdasarkan fenomena dan teori diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK Nomor 35 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Berorientasi Nonlaba pada Masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae Kab. Majene”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae dengan ISAK Nomor 35?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan pada masjid Raya Raudhatul Abidin Banggae dengan ISAK nomor 35.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengalaman dan wawasan dalam mengembangkan penelitian dan masalah pada organisasi Nonlaba Mesjid

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti diharapkan mampu menambah wawasan mengenai akuntabilitas dan transparansi Masjid sebagai organisasi Nonlaba

2. Bagi Masjid, kiranya penulisan ini dapat dijadikan sebagai landasan atau pegangan bagi pengelola masjid dalam melakukan pencatatan atas transaksi masjidnya sehingga arus keluar masuk kas lebih jelas penggunaannya, mengingat masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nonaba yang digunakan sebagai sarana ibadah dan digunakan untuk segala hal yang berhubungan dengan kegiatan umat.
3. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama.
4. Bagi akuntansi sektor publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk instansi organisasi sektor publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek akuntansi yang perlu diperhatikan selain transparansi hasil pencatatan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Akuntabilitas dapat didefinisikan dalam beberapa aspek: konsep, prinsip, dan tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan istilah sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Prinsip akuntabilitas adalah pengelola memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal. Akuntabilitas juga mencakup unsur yang memperjelas fungsi dalam suatu organisasi dengan meminta pertanggungjawabannya. (Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016). Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pengelola yang diberi tanggungjawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Prasetio, J.A. (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab Pengelola atau pemberi tugas kepada wali yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dapat bersifat vertikal atau horizontal. Sochimim (2015) Akuntabilitas yang bersifat vetikal berupa akuntabilitas kepada otoritas yang lebih

tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas kepada pihak secara luas atau kepada sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan sebagai atasan dan bawahan. Akuntabilitas publik juga merupakan pertanggungjawaban atas keputusan maupun tindakan dari para pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pihak pengelola dalam mengelola sumber daya publik berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan teori diatas dapat diimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah bentuk tanggung jawab pengelola atau pemimpin organisasi atau pemerintahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan kegiatan atau aktivitasnya.

2.1.3 Transparansi

Transparansi sebagai suatu penilaian dalam mencapai prinsip *Good Government* dimana menyajikan laporan keuangan kepada semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal dengan menggunakan prinsip keterbukaan mengenai bagaimana pengelolaan organisasi tersebut sebagai landasan pengambilan keputusan.

Selain itu, organisasi juga diwajibkan untuk menyampaikan kepada para pemberi amanah mengenai kebijakan yang mereka terapkan. Oleh karena itu, merujuk pada teori tersebut organisasi yang transparansi erat kaitannya dengan kejujuran, serta dapat dipercaya dalam memberikan informasi.

Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016) menyatakan transparansi menurut KNKG transparansi merupakan keadaan dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan. Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016) menyatakan

bahwa, menurut transparansi NCG (Komite Nasional Tata Kelola), pihak pengelola berkewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi dalam penyampaian informasi artinya informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat dan tepat waktu bagi semua pihak yang berkepentingan.

Secara fiskal, *Asian Development Bank* atau ADB memberikan indikator atau prinsip-prinsip *good financial governance*, sebagaimana dikutip dalam Asminar (2017). Anggaran yang disusun oleh suatu instansi pemerintah dianggap transparan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran mudah dipahami dan mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut Agus Dwiyanto ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggara peran pemerintah yang diungkapkan oleh Asminar (2017), yaitu :

1. Mengukur keterbukaan proses pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur harus dipublikasikan secara terbuka dengan cara yang dapat dengan mudah dipahami oleh mereka yang membutuhkan, serta menjelaskan alasannya.
2. Seberapa mudah pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami aturan dan prosedur pelayanan. Aturan dan prosedur ini sederhana, langsung, dan mudah diterapkan, sehingga mengurangi perbedaan interpretasi.
3. Indikator ketiga adalah ketersediaan informasi tentang berbagai aspek pelayanan publik. Informasi tersedia secara bebas. Cara mengukur: a. Adanya

sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan dapat dipahami untuk semua proses dalam menjalankan peran pemerintah. b. Adanya mekanisme untuk memfasilitasi penyelidikan publik mengenai prosedur administrasi, terdapat mekanisme untuk melaporkan dan menyebarluaskan informasi tentang penyimpangan perilaku pejabat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

2.1.3 Organisasi Nonlaba

2.1.3.1 Pengertian Organisasi Nonlaba

Menurut PSAK 45 Organisasi Nonlaba adalah organisasi yang tidak ada kepemilikannya yang kegiatan operasionalnya dibiayai dengan menggunakan dana hasil sumbangan, donatur dan para anggota yang sukarela tanpa mengharapkan imbalan kembali atau manfaat ekonomi. Organisasi nonlaba dalam kegiatannya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat atau pemberi dana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dari laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. (Tinugnki dan Rudy, 2014)

Organisasi nonlaba adalah organisasi yang tujuan utamanya untuk mendukung menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang tujuannya tidak komersial tanpa terlibat kedalam hal-hal yang sifatnya mencari keuntungan. Organisasi nonlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh. Organisasi nonlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang berharga, karena organisasi ini aktivitasnya pemberian jasa yang pada dasarnya untuk diri, oleh dan untuk menuasia (Marlinah dan Ibrahim, 2018)

2.1.3.2 Karakteristik Organisasi Nonlaba

Organisasi Nonlaba berbeda dengan organisasi komersial yang kegiatan berorientasi pada laba dalam hal karakteristik, dimana perbedaannya terletak pada bagaimana organisasi memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Organisasi nonlaba memperoleh dana dari sumbangan ataupun semacamnya, dan tanpa ada balasan imbalan kepada pemberi dana. Sekalipun organisasi nonlaba hanya mengandalkan sumbangan dan tidak berorientasi pada profit, organisasi nonlaba tidak akan mengalami *defisit*. Dan apabila organisasi mendapatkan keuntungan, maka jumlahnya tidak akan dibagikan kepada pemberi dana. (Reza & Nurfadliyah, 2020)

Menurut Firdaus dan Yulianti (2018), Karakteristik organisasi Nonlaba Sebagai Berikut:

1. Sumber daya organisasi nonlaba berasal dari sumbangan dan tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang ada/atau jasa tanpa bertujuan mmupuk laba dan jika entitas nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagi sumber daya entitas pada saat liquidasi atau pembubaran entitas nonlaba.

2.1.3.3 Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang menguraikan kinerja dari organisasi tersebut dalam suatu periode. Laporan keuangan dianggap sangat penting untuk dibuat dan disusun yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas terhadap para penggunanya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memebrikan infomasi kepada pihak yang membutuhkan mengenai kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. (Dinanti dan Nugraha, 2018). Menurut kasmir (2019) Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan laposisi keuangan suatu entitas pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan kegunaant informasi yang disajikan dlam laporan keuangan agar lebih bermanfaat bagi para pengguna.

Berdasarkan ISAK Nomor 35 Tujuan Iaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba.

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nonlaba dan kemampuannya untukterus memberikan jasa tersebut;
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain darikinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset bersih suatu organisasi; Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aset bersih; Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara

keduanya; Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; Usaha jasa suatu organisasi.

Laporan keuangan organisasi nonlaba menurut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan (Format A)

Pada laporan posisi keuangan format A, entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

b. Laporan Posisi Keuangan (Format B)

Pada laporan posisi keuangan format B mencakup jumlah penghasilan komprehensif lain (entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya, misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan keuangan komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan ini, kita dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan atau organisasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk menilai dan melakukan prediksi jumlah dan ketidakpastian arus kas perusahaan atau organisasi dimasa yang akan datang.

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian Dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas Bisnis. Aset Neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

- a. Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
- b. Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas Untuk entitas bisnis, dimana arus kas dibagi kedalam tiga aktivitas yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas dapat menggunakan dua metode, Yaitu metode Langsung dan Metode Tidak Langsung.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci. Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan catatan B wajib disajikan. Catatan C, D Dan E menyajikan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh organisasi nonlaba. Semua jumlah dalam jutaan rupiah.

a. Catatan A

Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa kas atau aset lain, Sebagai sumbangan dengan pembatasan, jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk Penggunaan aset atau atas manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kedaluwarsa, yaitu pada saat

masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa Pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Entitas menyajikan hibah atau wakaf, berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomik masa depan yang diperoleh dari Aset tersebut dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset Tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai Sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara *Eksplisit* dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu Penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan Pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

b. Catatan B

Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang Dibatasi tujuan atau periodenya

c. Catatan C

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadinya beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan Atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan Oleh pemberi sumber daya.

d. Catatan D

Investasi dicatat pada nilai wajar. Entitas menginvestasikan Kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam investasi jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 20X2, Rp.XX diinvestasikan daya Investasi lancar dan menghasilkan Rp.XX per tahun. Sebagian besar Investasi jangka panjang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A adalah dana abadi (*donor-restricted endowment*) dan tidak diwajibkan untuk menaikkan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah yang oleh badan perwalian ditujukan untuk investasi jangka panjang.

Undang-undang dan peraturan memungkinkan pemerintah untuk Menyesuaikan begitu banyak dana abadi (*endowment fund*) seperti Dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan berikut: durasi dan Pemeliharaan dana abadi, tujuan dari entitas berorientasi nonlaba dan Dana abadi, kondisi ekonomik secara umum, kemungkinan dampak Inflasi atau deflasi, total imbalan yang diperkirakan berasal dari Penghasilan dan penyesuaian investasi, sumber daya lain entitas Berorientasi nonlaba dan kebijakan investasi. Berdasarkan kebijakan Pengeluaran dana abadi, Y% dari rata-rata nilai wajar pada akhir 3 Tahun sebelumnya disesuaikan, yaitu Rp.XX untuk tahun yang Berakhir 31 Des 20X2.

e. Catatan E

Menyajikan Beban yang terjadi.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Mesjid

Masjid merupakan organisasi nonlaba kategori Non-profit yang memiliki karakteristik sebagian besar sumber daya organisasi bergantung pada penyedia sumber daya yang tanpa ada timbal balik diantaranya, operasional organisasi menyediakan jasa/barang yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan, dan tidak ada kepentingan pemilik didalamnya seperti halnya pada bisnis. Pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan administratif yang berkaitan dengan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan penerimaan tersebut. Pengelola keuangan masjid adalah pengelola masjid dalam hal ini biasa disebut dengan takmir masjid. Adanya pengelolaan keuangan merupakan suatu upaya dalam membantu takmir masjid dalam membuat suatu perencanaan dalam mengelola keuangan masjid secara efektif dan efisien.

Sumber-sumber penerimaan mesjid berasal dari sumbangan dari masyarakat atau jamaah dalam bentuk infaq dan sedekah. Selain itu, biasanya terdapat mesjid yang memiliki donasi tetap setiap minggu. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran mesjid yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Pengeluaran rutin biasanya biaya listrik, PDAM, dan lain sebagainya serta termasuk biaya pemeliharaan bangunan dan fasilitas mesjid (Nurjannah, 2018)

Sebagai salah satu ruang publik, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola mesjid. Mesjid dituntut melakukan publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparansi terhadap informasi keuangan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas terhadap ruang publik. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pencatatan laporan keuangan

sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat/jamaah yang memberikan amanah kepada pengelola mesjid dalam pengelolaan dana tersebut. Akan tetapi laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masih sangat sederhana dengan bentuk empat kolom yaitu uraian, penerimaan pengeluaran dan saldo yang biasanya dilaporkan setiap minggu selepas shalat jum'at.

2.2 Penelitian Tedahulu/Tinjauan Empirik

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hail penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurlailah dkk (Jurnal Assets, volume 4 no. 2) 2014	Akuntabilitas dan keuangan mesjid di Kecamatan Tubo Sendana	Laporan keuangan mesjid dari keduanya masih tergolong sederhana sebagai wujud pertanggung jawaban atau transparansi dari keuangan mesjid hanya berbasis kepercayaan antar pengurus dan masyarakat.	Persamaan yang diteliti adalah mengangkat mengenai pengelolaan keuangan masjid	Dalam penelitian sebelumnya lokasi penelitiannya ada 2 masjid yang diteliti sedangkan penulis sekarang hanya berfokus pada 1 lokasi penelitian.
2.	Sully kemala dkk (JIUBJ, volume 21, no 3 2021)	Akuntabilitas mesjid berdasarkan ISAK 35di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas	Takmir atau pengurus mesjid mengelola keuangan mesjid secara akuntabel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan tetapi masih sederhana. Pencatatan	Persamaan yang diteliti adalah mengangkat mengenai pengelolaan keuangan masjid.	Penelitian sebelumnya terdiri 14 sampel. Sedangkan penelitian sekarang hanya terdiri 1 sampel.

No	Nama	Judul	Hail penelitian	Persamaan	Perbedaan
			belum sesuai dengan standar ISAK 35 dikarenakan belum pernah terdengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.		
3.	Yesika Ynuarisa (jurnal balance. Volume 12, no 2) 2020	Implementasi ISAK 35 pada Yayasan Al ikhsan	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimetea Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.	Sama-sama membahas mengenai laporan keuangan organisasi nonlaba	Penelitian sebelumnya dilakukan pada Yayasan pendidikan sedangkan penulis sekarang memilih lokasi penelitian di Masjid
4.	Novita Alaika sari, Ana Sopanah, Dwi Angraeni (Jurnal of Public and Business Accounting, volue 3 no 1) 2022	Akuntabilitas dan transparansi penglolaan keuangan pada Masjid Sabilillah di kota Malang berdasarkan isak 35)	Masjid sabilillah pertanggungja waban keuangan sudah dilakukan secara terbuka. Namun terkait dengan laporan keuangan yang dibuat masih belum sesuai pada ISAK 35, masih mengacuh pada standar yang lama.	Sama sama membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid	Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di kota Malang sedangkan penulis sekarang melakukan penelitian di kota Majene.
5.	M. Nurul Hidayat, Ira Hasti Priyadi (Jurnal akuntans	Implementasi pengelolaan keuangan mesjid Agung Asy-Syuhada	Tersedianya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK no. 45 Mesjid Agung	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan keuangan mesjid	Penelitian sebelumnya tidak menggunakan indikator apapun dalam

No	Nama	Judul	Hail penelitian	Persamaan	Perbedaan
	i dan keuangan syariah) 2022	pamekasan berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi Nirlaba	Asy-Syuhada memiliki informasi keuangan yang akuntabel untuk disajikan pada masyarakat		penelitiannya . Sedangkan penulis sekarang menggunakan indikator pertanggungjawaban dan transparansi

2.3 Kerangka Berfikir

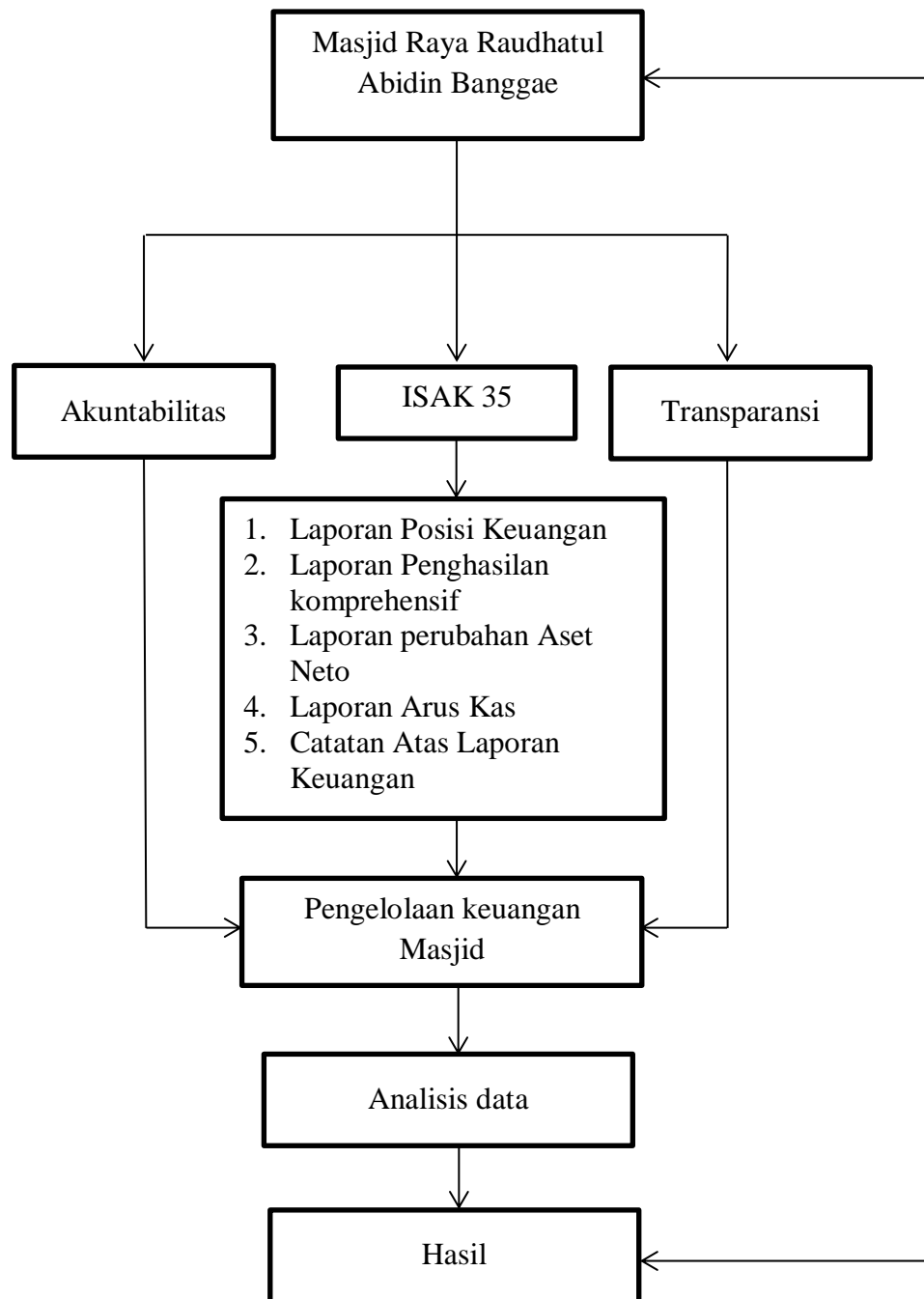
Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi pada organisasi islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian, padahal sangatlah penting dilakukan praktik pengelolaan keuangan masjid sebagai penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat, mengingat masyarakat jamaah masjid termasuk para donatur kini sudah bisa membaca keadaan mesjid. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap terjadinya praktik-praktik curang atau tidak amanahnya pengelola mesjid dalam hal ini bendahara mesjid, takmir mesjid dan lain-lain. Maka perlu dilakukan pencatatan laporan keluar masuknya kas yang meliputi sumber pemasukan kas, penggunaan kas untuk apa saja. Hal ini membuat keuangan masjid lebih terkontrol dan pengelolaannya transparan.

Masjid Raya Raudhatul Abidin adalah mesjid yang terletak di tengah kota Majene. Daya tampung jamaah pada mesjid ini cukup besar sehingga jamaah yang datang juga tidak sedikit ketika memasuki waktu shalat. Selain itu, mesjid ini memiliki donasi tetap setiap minggunya dan pengurus yang terbentuk didalamnya terdiri dari semua lini masyarakat termasuk pejabat tinggi daerah kabupaten

Majene. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa arus kas masuk dan keluar masjid ini lancar. Dalam penyusunan laporan keuangan nonlaba dalam hal ini mesjid, ISAK 35 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (ISAK IAI) yang merupakan turunan dari PSAK 01 Paragraph 35 harus memenuhi lima komponen yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan penghasilan komprehensif, Laporan perubahan asset neto, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi ini diharapkan pengelola masjid bisa menghasilkan sebuah pengelolaan keuangan masjid yang baik dengan melakukan penyusunan laporan keuangan dan mengungkapkannya secara transparan dihadapan jamaah dan donatur. Hal akan maningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur terhadap mesjid unruk menginfakkan uangnya kepada masjid tersebut.

Berdasarkan penejlasan diatas, maka kerangka pikiran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di Masjid Raya Raudhatul Abidin proses pengelolaan keuangannya sudah akuntabel dan transparan tapi belum sesuai dengan ISAK 35, dimana hanya menyajikan laporan keuangan sederhana. Hal ini karena pihak pengurus masjid belum mengetahui istilah ISAK 35, aturan akan laporan keuangannya merupakan tradisi turun temurun, dan tidak ada yang membimbing terkait ISAK. Laporan keuangan disajikan juga secara mingguan yang memuat informasi saldo, penerimaan dan pengeluaran saja, pengurus masjid belum membuat laporan secara tahunan. Untuk pencatatannya sudah dikomputerisasi sehingga memudahkan bagi para pengguna untuk membaca laporan keuangan Masjid Raya Raudhatul Abidin.

Selain itu Bentuk akuntabilitas dan transparansi Masjid Raya Raudhatul Abidin juga dapat dilihat dengan adanya kegiatan seperti pelayanan kepada masyarakat serta adanya kegiatan peduli kepada sesama seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, sampai pada mengunjungi pengurus masjid yang sakit.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, peneliti hendak mengajukan saran yang harapannya dapat berguna bagi pengurus masjid yang bertanggungjawab dalam mengelola aktivitas masjid yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini hanya berfokus satu masjid sehingga diharapkan untuk penelitian yang akan datang dapat menambah jumlah objek penelitian, agar bisa membandingkan hasil penelitian dengan objek yang lain.
2. Bagi Masjid, diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber dayanya dalam hal pengelolaan keuangan, diharapkan laporan keuangan Masjid disempurnakan serta membuat laporan tahunan sehingga memudahkan membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan ISAK 35 seperti yang telah dibuat oleh penulis, mengingat Masjid Raya Raudhatul Abidin merupakan masjid yang kepengurusannya di setujui langsung oleh Bupati Majene dan Masjid yang berada ditengah kota Majene. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangannya lebih rinci dan pengungkapannya dapat dilakukan dengan baik serta akuntabel dan transparan kepada para jamaah.
3. Bagi Dewan Masjid Indonesia, agar melakukan sosialisasi mengenai ISAK 35 bagi Organisasi nonlaba, dalam hal ini masjid, baik masjid besar maupun masjid kecil yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam pengelolaannya memang masjid membutuhkan perhatian yang lebih mengenai pencatatan keuangan. Hal ini bertujuan demi terwujudnya sistem pencatatan keuangan masjid yang lebih baik lagi untuk menghindari kesalahan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asminar. 2017. Pengaruh pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada baznas kota binjai. *Jurnal at-tawasuh*, vol. 3, no. 3.
- Dinanti, A. Nugraha, G.A. (2018). Pelaporan keuangan organisasi nirlaba. *Jurnal ekonomi bisnis dan akuntansi (jeba)*, Vol.14, No. 1.
- Fikri, A, Isnani. (2013). Akuntabilitas Non government organization. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol 2. No 2 jun 2013.
- Fokus metro sulbar. (2016, juni 19). Dibangun sekitar satu abad silam mesjid banggae sarat nilai sejarah. Retrieved from <https://www.fokusmetrosulbar.com/2016/06/dibangun-sekitar-satu-abad-silam-mesjid.html?m=1>
- Jusrang. (2021). Analisis penerapan ISAK No. 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba studi kasus pada aksi cepat taggap sulawesi selatan. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan. Andi : Yogyakarta
- Kusnadi. (2018). Analisis laporan arus kas sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dompu. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
- Nurfitriyana. (2019). Akuntabilitas dan transparansi keuangan mesjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Yusuf dalam perspektif islam. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri alauddin makassar.
- Nurjannah. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan mesjid: PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba mesjid al-markaz al-silami jendral m. Yusuf. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri alauddin makassar.
- Nurlailah, Nurleni, Madris (2014). Akuntabilitas dan keuangan mesjid di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Skripsi universitas hasanuddin makassar.
- Prasetio, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: kajian teoritis konsep akuntabilitas. *Jurnal analisa dan perpajakan*, VII, No. 1.

- Priyadi, I.H., Hidayat, M.H. (2021). Implementasi pengelolaan keuangan mesjid agung asy-syuhada pemekasan berdasarkan PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. *Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, Vol
- Reza, Nurfadliyah. (2020). Penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 45 pada mesjid Al-imam bukit tinggi. *Jurnal tambora*, vol 4 no. 2.
- Sari, N.A. Dwi, A.S. Angaraini, D. 2022. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada mesjid sabilillah di kota Malang berdasarkan ISAK 35. *Jurnal o publ dan business accountung*, vol 3 no. 1.
- Sochimin, M. 2015. Prakti manajemen keuangan mesjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat di kota Purwokerto. Institut agama islam negeri purwokerto,
- Sumber : IAI. 2019. ISAK 35 : Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi Nonlaba.
- Sugiyono. 2019. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Statistika untuk penelitian. Bandung : Alfabeta
- Suworo, I.S., Tjahjani, M., Octisari, S.K. 2021. Akuntabilitas mesjid berdasarkan isak 35 di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Jurnal ilmiah*, vol 21 no. 3.
- Tinungki, A.N.M, Rudy, J. (2014). Penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada panti ssial tresna werdha hana. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas sam ratulangi manado.
- Universitas Sulawesi Barat, F.E. 2020. Pedoman penulisan skripsi. Majene
- Yanuarisa, Y. 2020. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. *Jurnal baance*, vol 12, no. 2.